

KONFLIK AGRARIA DAN DISINTEGRASI BANGSA: TANTANGAN KEAMANAN NASIONAL INDONESIA

AGRARIA CONFLICT AND DISINTEGRATION: CHALLENGES FOR INDONESIA'S NATIONAL SECURITY

Erlinda Matondang¹

Conflict Resolution Unit-Indonesia Business Council
For Sustainable Development (CRU-IBCSD)
(erlinda.matondang@gmail.com)

Abstrak – Di beberapa negara, perpecahan terjadi karena politisasi terhadap perbedaan yang pada awalnya justru mendasari terbentuknya suatu negara. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman suku, ras, dan agama. Sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman masyarakat, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai konflik, salah satunya adalah konflik agraria. Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat hubungan antara konflik agraria dan disintegrasi bangsa serta posisinya dalam sistem keamanan nasional Indonesia. Dengan kata lain, objek dari artikel ini adalah hubungan antara konflik agraria dan disintegrasi bangsa serta posisi keduanya dalam sistem keamanan nasional Indonesia. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil pengamatan dalam artikel ini menunjukkan bahwa konflik agraria dapat memicu perpecahan di antara masyarakat dan menurunkan legitimasi terhadap pemerintah. Peluang disintegrasi atau perpecahan yang disebabkan oleh konflik agraria ditentukan oleh dimensi subjek-objek dan kebijakan pemerintah. Selain itu, konflik agraria dapat ditempatkan sebagai salah satu ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Setidaknya ada empat alasan untuk menarik kesimpulan ini, yaitu subjek dan objek konflik merupakan bagian dari komponen fisik negara yang harus dijaga, tumpang-tindih kebijakan (komponen institusional negara) yang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik, adanya isu SARA, dan sikap anarkhis yang kerap kali dianggap sebagai solusi terbaik.

Kata Kunci : agraria, disintegrasi, keamanan nasional, konflik

Abstract – In some countries, disintegration is happened because politicization of disparities which had been being their foundation in the beginning. Indonesia is precisely standing as a country with its disparities—which can be called as plurality—in ethnics, races, and faiths. As a country with plurality in its society, Indonesia is really fragile in facing domestic conflicts; one of them is agrarian conflicts. This article is written for understanding the relations between agrarian conflict and disintegration and also finding their position in Indonesian national security system. Thus, the object of the observation in this article is the relations between agrarian conflict and disintegration and their position in Indonesian national security system. The results of this observation bring the fact that agrarian conflicts can trigger disintegration among people and decrease legitimacy to the government. The possibility of disintegration is determined by subject-object dimension and government's policies. Besides, agrarian conflicts can be classified as threats to Indonesian national security. There are four reasons why agrarian

¹ Penulis merupakan lulusan Universitas Pertahanan Program Studi Diplomasi Pertahanan Tahun 2015 dengan lebih dari dua tahun pengalaman bekerja di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Penulis pernah meraih Juara II Penghargaan Ali Atlas 2016 dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Saat ini, penulis bekerja di lembaga yang berfokus pada penanganan konflik agraria dan pengolahan sumber daya alam.

conflict should be placed as a threat to national security, i.e. conflict subject and object are Indonesia's physical-based component which have to be protected; overlapping policy (institutional component) causing conflict; plurality issues; and anarchical behaviours often estimated as the best solution.

Keywords: agraria, disintegration, national security, conflict

Pendahuluan

Sejak proses pemilihan umum tahun 2014 dimulai, dinamika politik dalam negeri terus menumbuhkan benih-benih disintegrasi. Potensi konflik terus berkembang, khususnya di bidang politik, agama, dan rasial-suku. Persepsi stereo-tipikal, prasangka, dan bias sosio-kultural yang muncul dalam keanekaragaman yang menjadi dasar pembentukan Indonesia ini menjadi pemicu munculnya ujaran kebencian yang berujung pada konflik.²

Indonesia merupakan negara yang rentan berkonflik. Gesekan-gesekan perbedaan dalam masyarakat yang pluralitas kerap kali mencuat menjadi konflik. Konflik di Sampit dan Ambon merupakan dua dari konflik yang terjadi di Indonesia. Walaupun sudah berhasil ditangani dengan baik oleh pemerintah Indonesia, tidak ada yang bisa menjamin tidak ada gesekan perbedaan yang akan memicu kembali kedua konflik ini.

Salah satu jenis konflik yang kerap terjadi di Indonesia adalah konflik agraria. Dengan semangat reforma agraria yang digemakan oleh Presiden Joko Widodo, penanganan konflik agraria menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya kementerian/lembaga (K/L) yang berkaitan langsung dengan permasalahan

tersebut, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Semangat reforma agraria tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 86/2018 tentang Reforma Agraria yang berpayung pada TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Di dalam Perpres No. 86/2018 dinyatakan bahwa reforma agraria didefinisikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset, dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sementara itu, konflik agraria didefinisikan sebagai perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan, dan budaya. Dengan kata lain, suatu kondisi yang disebut konflik agraria mempunyai potensi atau sudah berdampak pada tataran sosial, politis, ekonomi, pertahanan, dan budaya. Oleh karena itu, saat membahas penanganan konflik agraria, isu sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan budaya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.

² Azyumardi Azra, "Pidana Kebencian" dalam *Kompas*, 29 Agustus 2019,

Saat konflik agraria sudah mengakibatkan benturan fisik yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu dan berdampak pada stabilitas dan keamanan nasional, maka konflik tersebut juga disebut sebagai konflik sosial. Dalam kondisi tersebut, penanganannya mengacu pada Undang-undang (UU) No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Hanya saja pada penanganan awal, konflik agraria hanya melibatkan beberapa K/L, termasuk ATR/BPN dan KLHK.

Pemerintahan Joko Widodo menempatkan penanganan konflik agraria dalam prioritas Nawacita. Langkah nyata ditunjukkan sejak pertengahan tahun 2018 melalui penerbitan kebijakan penyelesaian konflik agraria, pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat, dan pembentukan Tim Percepatan Penanganan Konflik Agraria (TP2KA).³

Sayangnya, upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, beberapa dari kebijakan tersebut justru mendorong munculnya konflik agraria. Sebagai contoh, konflik pengelolaan lahan wisata di Kabupaten Malang. Dalam konflik ini, ada tiga Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mendapatkan sertifikat lahan dalam skema Perhutanan Sosial (PS). Di sisi lain, ada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk oleh Perum Perhutani dalam kerangka Penanaman Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Baik

³ Kantor Staf Kepresidenan, "KSP Siap Bantu DPRD Kabupaten Selesaikan Konflik Agraria <http://ksp.go.id/ksp-siap-bantu-dprd-kabupaten-se-indonesia-selesaikan-konflik-agraria/>, 30 Agustus 2018, diakses pada 25 September 2019.

PS maupun PHBM merupakan program pemerintah.⁴

Sejak dibentuk oleh KSP, TP2KA sudah menerima 790 laporan konflik agraria.⁵ Sementara itu, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), hingga tahun 2018, tercatat ada 73% konflik agraria terjadi di sektor perkebunan yang belum selesai.⁶ Sebaran konflik agraria sebagian besar berada di sepuluh provinsi, yaitu Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Aceh, Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. Di antara provinsi-provinsi tersebut, Riau, Jawa Timur, dan Jawa Barat selalu menempati posisi lima besar.⁷

Beberapa orang berpandangan bahwa konflik agraria merupakan isu yang berkaitan dengan iklim usaha dan perbaikan perekonomian. Namun, lebih dari itu, konflik agraria juga bisa menyebabkan munculnya disintegrasi. Bahkan, mungkin pula sebaliknya disintegrasi bangsa dapat memicu terjadinya konflik agraria. Dengan pemahaman bahwa disintegrasi

⁴ Ashaq Lupito, "Konflik Pengelolaan Wisata Pantai di Kabupaten Malang dipastikan Berlanjut, Berikut Akar Persoalannya", <https://www.malangtimes.com/baca/32154/20181013/232400/konflik-pengelolaan-wisata-pantai-di-kabupaten-malang-dipastikan-berlanjut-berikut-akar-persoalannya>, 13 oktober 2018, diakses pada 8 November 2019.

⁵ CNBC Indonesia, "Wamen ATR Buka-bukaan Soal Tumpang Tindih Lahan & Mafia Tanah", <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20191106155628-41-113177/wamen-atr-buka-bukaan-soal-tumpang-tindih-lahan-mafia-tanah>, 7 November 2019, diakses pada 8 November 2019.

⁶ Konsorsium Pembaruan Agraria, "Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik", (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018), hlm. 30.

⁷ *Ibid*, hlm. 33.

merupakan suatu gejala sosial yang menunjukkan adanya pemisahan diri suatu kelompok masyarakat dari negaranya dengan berbagai alasan. Jika merunut konflik yang terjadi di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Papua dengan Operasi Papua Merdeka (OPM), konflik agraria dapat menjadi penyebab atau akibat dari gejala sosial yang disebut disintegrasi.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan konflik agraria dengan disintegrasi bangsa dan posisi keduanya dalam sistem keamanan nasional. Artikel ini dibuat berdasarkan hipotesis yang menunjukkan bahwa konflik agraria dapat berubah menjadi konflik sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi bangsa Indonesia. Dengan adanya konflik agraria yang berkembang menjadi konflik sosial dan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, sistem keamanan nasional Indonesia sedang terancam dengan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa.

Ruang Lingkup Penelitian

Keamanan nasional dari setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda. Hal ini ditentukan oleh kondisi geografis, sosial, budaya, dan lainnya. Penulisan dalam artikel ini berfokus pada permasalahan keamanan nasional Indonesia, khususnya pada isu konflik agraria dan disintegrasi bangsa. Dengan kata lain, hal yang dibahas dalam artikel ini tidak dapat digunakan untuk memahami kondisi negara lain.

Metode Penelitian

Konflik dan disintegrasi bangsa merupakan dua dari sekian banyak isu keamanan nasional. Konflik dan disintegrasi merupakan permasalahan sosial yang tidak dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Penulisan artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pengkajian literatur.

Hasil dan Pembahasan

Konflik Dan Resolusi Konflik

Konflik merupakan permasalahan sosial yang bersifat dinamis. Konflik merupakan sebuah sistem sosial yang dibentuk oleh aktor-aktor dengan tujuan yang saling bertentangan.⁸ Oleh karena itu, ada dua unsur utama dalam teori konflik, yaitu aktor dan tujuan. Kedua unsur ini yang menentukan dinamika suatu konflik.

Untuk mengonseptualisasikan konflik, Johan Galtung juga menyusun rumus yang didasarkan pada delapan elemen konflik. Kedelapan elemen tersebut adalah (1) aktor konflik yang membentuk sistem aktor (m); (2) tujuan (n) dengan *action-system* yang pergerakannya dapat ditinjau dalam dimensi tujuan (R); (3) *acceptability-region* (A) atau dimensi tujuan yang diterima oleh semua aktor; (4) *incompatibility-*

⁸ Johan Galtung, *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, and Formations*, (Colombia: Colombia University, 1958), hlm. 35.

region (I) atau dimensi tujuan yang tidak sesuai dengan keinginan beberapa aktor dan *compatibility-region* (C) atau dimensi tujuan yang bersesuaian; (5) konflik dengan sistem konflik yang terbentuk saat tidak ada kecocokan antara A dan C; (6) *conflict attitude*; (7) *conflict-behavior*; (8) *conflict-negation* yang dapat diidentifikasi ketika aktor-aktor sudah mencapai kesepakatan atau tidak ada ketidaksesuaian antara A dan C. Elemen (6) dan (7) merupakan dasar awal untuk membedakan resolusi konflik dengan *conflict repression* karena analisis yang dilakukan pada elemen ini harus dapat menunjukkan kerusakan yang terjadi akibat konflik serta karakter dan sikap masing-masing aktor.⁹

Resolusi konflik yang diberlakukan saat konflik pada tahap de-eskalasi adalah intervensi untuk menghentikan tindakan saling membunuh. Pengiriman militer ke wilayah konflik dibutuhkan dalam rangka menghentikan konflik, mengurangi jumlah korban, dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Namun, pada beberapa kondisi pengiriman militer ke wilayah konflik tidak berdampak baik pada penyelesaian konflik.¹⁰

Dalam konteks kenegaraan, konflik dapat dibedakan menjadi konflik antarnegara dan konflik intra-negara atau konflik domestik. Konflik antarnegara merupakan bagian dari interaksi di tataran

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Heru Cahyono, "The State and Society in "Conflict Resolution in Indonesia (Conflict Area of West Kalimantan and Central Kalimantan)", *Journal of Indonesian Social Science and Humanities*, Volume 1, 2008, hlm. 156.

internasional seperti perang. Sementara konflik intranegara meliputi gerakan insurgensi, pemberontakan, separatisme, perang sipil, konflik antarkomunitas, konflik antaretnik, dan konflik antara masyarakat dan organisasi asing, seperti negara atau lembaga non-pemerintahan asing.¹¹

Ancaman Disintegrasi Bangsa

Perpecahan suatu bangsa dalam suatu negara diindikasikan dengan adanya gerakan separatisme hingga pembentukan negara baru. Hal ini seperti yang dialami oleh negara-negara Asia Selatan, negara-negara Balkan, dan Uni Soviet. Disintegrasi di Asia Selatan ditunjukkan dengan kemunculan Pakistan dan Bangladesh sebagai negara yang merdeka. Setelah kemerdekaan India, warga negara muslim India yang berada di wilayah bagian utara menuntut kemerdekaan dari India. Tuntutan ini yang mendasari berdirinya negara Pakistan. Negara yang melepaskan diri dari India itu mengalami disintegrasi akibat perbedaan politik, ekonomi, dan bahasa, sehingga terbentuk negara Bangladesh yang masih menjadi negara tertinggal (*Least Developed Countries*) sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1971.

Wilayah Balkan meliputi negara Albania, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Yunani, Makedonia, Montenegro, Romania, Serbia dan sebagian wilayah

¹¹ Matthew Vaccaro, "Conflict Prevention and Resolution, dipresentasikan dalam *Defence Diplomacy Short Course* di Naval Postgraduate School pada 29 Juli 2015.

Turki. Wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnik yang beraneka ragam. Ada tiga agama yang menjadi identitas nasional negara-negara Balkan, yaitu Katholik, Kristen Ortodox Yunani, dan Islam. Perbedaan ini menjadi salah satu faktor konflik di kawasan ini. Namun, sebagian besar orang memandang wilayah ini sebagai kawasan yang homogen.¹²

Disintegrasi negara-negara Balkan dapat dilihat dengan terpecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara. Dua di antaranya adalah Serbia dan Montenegro yang disebut *The Federal Republic of Yugoslavia* hingga tahun 2003. Meskipun peperangan sudah tidak terjadi, potensi konflik masih ada di antara negara-negara Balkan. Hal ini yang menyebabkan kerja sama di kawasan tidak dapat berjalan dengan baik.

Disintegrasi yang dialami oleh Uni Soviet disebabkan oleh beberapa faktor *hard power*, seperti politik dan ekonomi. Beberapa ahli berpandangan bahwa permasalahan krisis ekonomi yang melanda Uni Soviet menyebabkan disintegrasi. Namun, beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa adanya keinginan rakyat untuk menggunakan sistem kapitalisme.

Berkaitan dengan penyebab runtuhnya Uni Soviet, pernyataan yang paling menarik disampaikan

¹² Jędrzej Paszkiewicz, "Factors affecting disintegration and integration processes in the Balkans after the Cold War", ResearchGate, April 2018, hlm. 216, dalam https://www.researchgate.net/publication/324390478_Factors_affecting_disintegration_and_integration_processes_in_the_Balkans_after_the_Cold_War.

oleh Zhang dan Xue dalam artikelnya. Menurut mereka, disintegrasi Uni Soviet disebabkan oleh hilangnya *soft power* dalam bentuk kebudayaan. Keterlibatan faktor politik, keterbatasan, dan kurangnya keterbukaan dalam perkembangan budaya menyebabkan hilangnya kebudayaan publik dan identitas ideologi.¹³

Berdasarkan penyebab-penyebab disintegrasi di kawasan Asia Selatan, negara-negara Balkan, dan Uni Soviet menunjukkan ada banyak faktor yang perlu diperhatikan. Keanekaragaman politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi penyebab dari sebagian besar disintegrasi di beberapa kawasan. Keanekaragaman merupakan suatu kekayaan, tetapi pengelolaan yang tidak tepat berakibat pada kesatuan suatu negara.

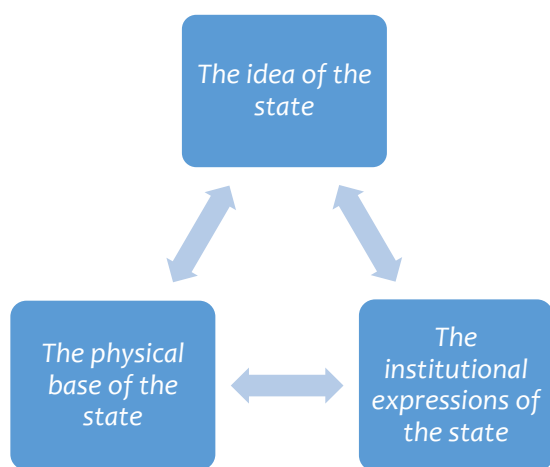
Konsep Keamanan Nasional

Dalam konteks kenegaraan, keamanan nasional menjadi alasan kemunculan suatu kebijakan dan pelaksanaan suatu tindakan, baik di tataran domestik maupun internasional. Keamanan nasional atau *national security* merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa objek dari keamanan adalah suatu bangsa. Bangsa dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mempunyai kesamaan budaya, ras, dan pusaka serta biasanya mendiami suatu wilayah.

¹³ Yuzhi Zhang dan Fengwei Xue, "On the Disintegration of the Soviet Union—From the Perspective of Soft Power in Culture", *Asian Social Science*, Vol. 6, No. 4, April 2010, hlm. 120.

Suatu bangsa berkaitan erat dengan pembentukan negara.¹⁴

Suatu negara dibentuk dengan tiga komponen yaitu ide negara (*the idea of state*), institusi negara (*the institutional expressions of the state*), dan dasar fisik negara (*the physical base of the state*). Ketiga komponen ini saling berkaitan, tetapi menunjukkan jenis ancaman keamanan yang berbeda-beda.¹⁵



Gambar 1. Tiga komponen negara

Sumber: *People, States, and Fear 2nd Edition: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, 1983, hlm. 40.

Bangsa merupakan bagian dari ide negara. Namun, model hubungan bangsa dan negara beranekaragam. Ada empat model hubungan bangsa dan negara. ¹⁶**Pertama**, *primal nation-state*, yaitu bangsa memegang peranan penting dalam pembentukan suatu negara, sehingga tugas negara adalah melindungi bangsa. Sementara itu, bangsa memberikan identitas yang kuat kepada negara di

¹⁴ Barry Buzan, *People, States, and Fear 2nd Edition: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*, (Sussex: Wheatsheaf Book, Ltd, 1983), hlm. 45.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 46—49.

dalam pergaulan internasional dan dasar legitimasi yang kuat di tataran domestik. Model ini ditunjukkan oleh Jepang.

Kedua, model ini disebut dengan *state-nation*. Model ini merupakan salah satu bentuk sistem *top-down* dengan negara memegang peranan dalam pembentukan bangsa. Dalam prosesnya, negara melakukan pembentukan dan penyebaran elemen kebudayaan yang seragam, seperti Bahasa, seni, adat istiadat dan hukum, yang nantinya akan menjadi identitasnya. Model ini biasanya terjadi di negara yang sebelumnya diokupasi oleh penduduk wilayah lain, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Ketiga, model yang membagi bangsa ke dalam beberapa negara disebut dengan *part-nation-state*. Di dalam model ini, satu bangsa mendominasi dua atau lebih negara. Hal ini terjadi pada bangsa Korea yang saat ini berada di Korea Utara dan Korea Selatan, bangsa China, dan bangsa Vietnam saat Perang Dingin.

Keempat, *multination-state*, yaitu negara yang dibentuk dari beberapa bangsa. Model ini mempunyai dua sub-model, yaitu negara federasi dan negara imperial. Di negara federasi, setiap negara bagian berhak untuk menentukan identitasnya tanpa ada dominasi dari negara. Hal ini diadopsi oleh negara-negara seperti Kanada, Yugoslavia, Inggris, Selandia Baru, dan India. Ide pembentukan negara federasi tidak dapat didasarkan pada rasa nasionalisme, tetapi kepentingan lain, seperti ekonomi dan geopolitik. Ketiadaan prinsip yang sama

dan rasa nasionalisme menyebabkan kerentanan terhadap separatisme, intervensi politik, dan perpecahan.

Sementara itu, negara imperial terbentuk saat satu bangsa dalam suatu negara mendominasi struktur negara untuk keuntungannya sendiri. Bangsa yang dominan akan menindas bangsa lain. Untuk negara imperial, ancaman politis merupakan permasalahan utama keamanan nasional.

Mesin yang menjalankan pemerintahan dalam suatu negara merupakan bagian dari institusi negara. Institusi negara terlihat lebih nyata dibandingkan dengan ide negara, sehingga posisinya lebih rentan terhadap ancaman fisik, seperti serangan militer atau tindakan politis.¹⁷ Dalam hal ini legitimasi dan pengaruh di tataran domestik sangat dibutuhkan.

Ancaman terhadap keamanan nasional pada institusi negara adalah kemampuan pemerintah untuk mengeksploitasi hubungan antara keamanan pemerintah dan negara yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan posisi di tataran perpolitikan dalam negeri. Bahkan, penggunaan angkatan bersenjata dimungkinkan untuk menghadapi pihak oposisi jika pemerintah mempunyai legitimasi yang lebih besar di tataran domestik. Namun, jika keamanan domestik sudah terikat secara permanen dalam keamanan nasional, pengamanan pemerintah dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, seperti yang terjadi di Uni

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 53.

Soviet dan Korea Selatan.¹⁸

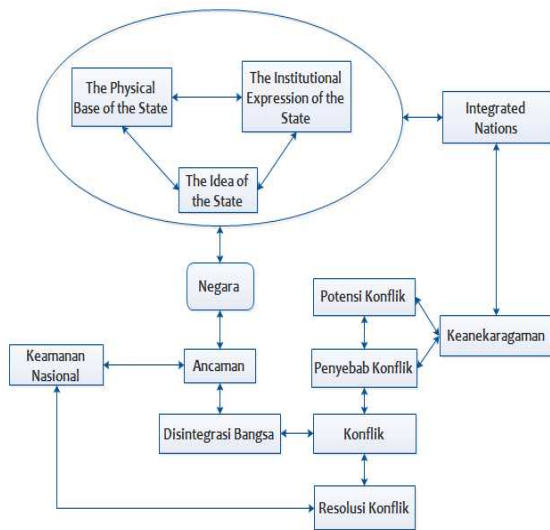
Komponen dasar fisik negara mengacu pada populasi dan wilayah negara, termasuk kekayaan yang berada di dalam batasnya. Ancaman terhadap komponen ini dapat berupa tindakan perampasan atau penghancuran. Ancaman terhadap wilayah dapat terjadi baik dari dalam maupun luar negara. Ancaman dari dalam dapat berupa pemberontakan akibat tidak adanya persetujuan dari suatu negara untuk menjadi bagian dari negara lain. Sementara itu, ancaman dari luar dapat berupa serangan dari negara lain terhadap properti fisik negara. Perlindungan terhadap wilayah dan populasi atau penduduk merupakan perhatian utama dalam keamanan nasional walaupun terkadang kedua hal ini harus dikorbankan untuk melindungi dua komponen negara lainnya.¹⁹

Hal ini yang ditunjukkan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Kedua negara berusaha menghindari serangan ke wilayahnya, tetapi mereka melakukan penyerangan kepada negara lain yang menjadi sekutu negara lawan. Semua itu dilakukan untuk melindungi ideologi liberalisme yang dicetuskan oleh Amerika Serikat dan sosialis komunisme yang dipegang erat oleh Uni Soviet.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 58—59.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 62—64.

Kerangka Teoritis



Gambar 2. Kerangka Teoritis

Sumber: Penulis, 2019.

Dalam hubungan negara dan bangsa, pembentukan suatu upaya penyatuan di antara keanekaragaman bangsa menjadi dasar pembentukan suatu negara. Bangsa yang bersatu membentuk tiga komponen negara, akan menyokong ketahanan negara menghadapi ancaman yang seringkali dirumuskan sebagai permasalahan keamanan nasional. Jika kesatuan bangsa yang membentuk negara terganggu, keanekaragaman akan menonjol. Hal ini akan memicu munculnya konflik, seperti konflik Suku, Adat, Ras, dan Agama (SARA). Jika konflik dibiarkan, disintegrasi bangsa muncul sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, resolusi konflik dibutuhkan sebagai salah satu penyokong ketahanan sistem keamanan nasional

Keamanan Nasional Indonesia dan Tantangannya

Keamanan nasional Indonesia merupakan bagian dari keamanan regional dan keamanan global. Gangguan pada

keamanan nasional Indonesia akan memengaruhi keamanan Asia Tenggara dan dunia. Hal ini didorong dengan meningkatnya interkoneksi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia mempunyai keanekaragaman penduduk. Setidaknya, ada 1340 suku bangsa yang berada di Indonesia.²⁰ Heterogenitas ini merupakan tantangan keamanan nasional Indonesia.

Bila ditinjau dari aspek pertahanan, keamanan nasional berkaitan dengan isu terorisme, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, separatisme, radikalisme, konflik komunal, bencana alam, dan kondisi politik pasca-reformasi.²¹

Konflik dan Resolusi Konflik di Indonesia

Keanekaragaman tidak hanya menjadi dasar berdirinya Indonesia sebagai negara yang merdeka, tetapi juga memunculkan potensi konflik yang cukup tinggi. Beberapa konflik sosial terjadi di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan sumber konflik di Indonesia ke dalam lima kategori, yaitu politik, ekonomi, dan sosial-budaya; SARA; batas wilayah, sumber daya alam,

²⁰ Badan Pusat Statistik dikutip dari Portal Informasi Indonesia, 2010, "Suku Bangsa", <https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diakses pada 14 September 2019.

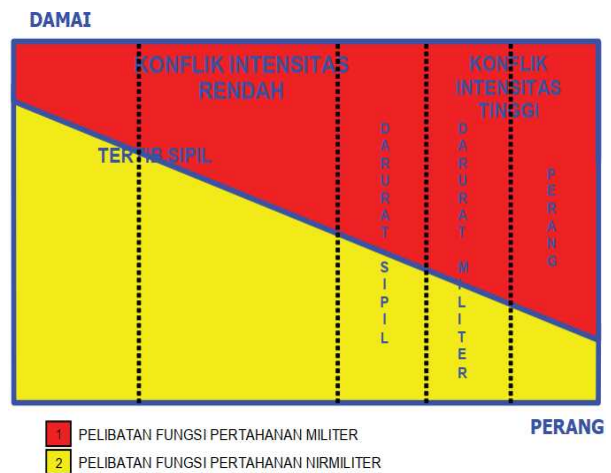
²¹ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, (Jakarta: Departemen Pertahanan Indonesia, 2008), hlm. 18.

dan ketimpangan distribusi sumber daya alam. Hal ini tercantum di dalam Undang-undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Penanganan konflik sosial di Indonesia diatur di dalam Undang-undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah No. 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42/2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Di dalam ketiga peraturan ini, resolusi konflik tidak hanya terbatas pada upaya penghentian konflik, tetapi juga pencegahan dan pemulihan. Pada tahap pencegahan, ada empat tindakan yang dapat diambil, yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan pembangunan sistem peringatan dini. Dalam pembentukan sistem peringatan dini dibutuhkan pemetaan potensi konflik, pemberian data dan informasi secara cepat dan akurat, hingga penguatan fungsi intelijen.

Di saat konflik sedang bergulir, pemerintah dapat mengambil tindakan penghentian konflik, seperti pemberian status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan yang diberikan kepada kelompok rentan, hingga penggunaan bantuan atau pengerahan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, pelibatan TNI mempunyai beberapa syarat kondisi konflik. Dua syarat utama

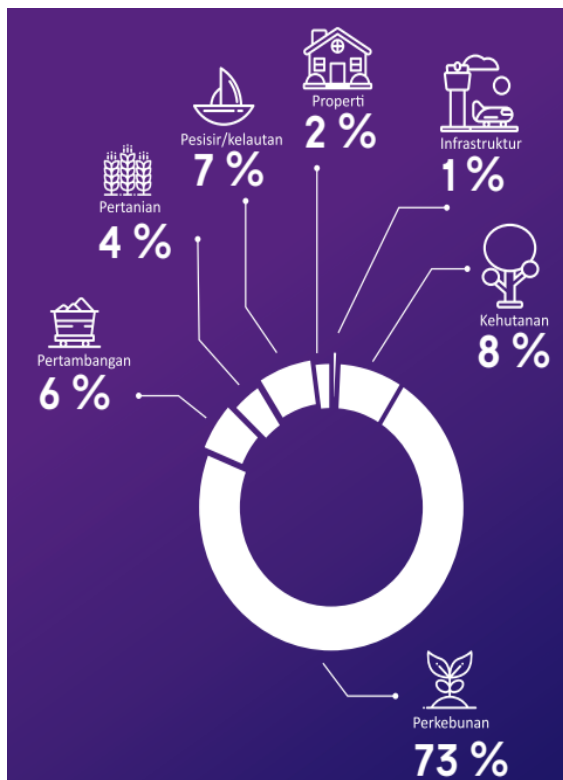
yang dapat menjadi alasan pelibatan TNI dalam penanganan konflik adalah konflik terjadi pada skala nasional dan konflik daerah yang terus menunjukkan eskalasi hingga mengancam stabilitas nasional.



Gambar 2. Spektrum Konflik dan Pelibatan Unsur Pertahanan

Sumber: Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008, hlm. 49.

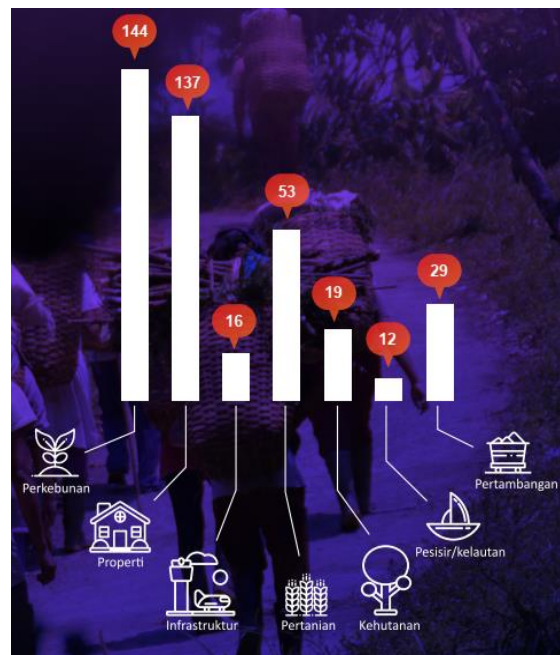
Perkembangan konflik menentukan fungsi pelibatan yang akan digunakan TNI dalam penanganan konflik. Pelibatan TNI dalam fungsi nirmiliter akan berlaku pada kondisi damai dengan potensi konflik yang rendah. Namun, eskalasi konflik yang dapat berujung pada perang akan mendorong TNI menggunakan fungsi militernya. Penindakan dengan fungsi militer juga dilakukan secara bertahap, mulai dari pernyataan darurat sipil, darurat militer, hingga perang. Sejauh ini, istilah perang masih digunakan untuk konflik yang terjadi dengan negara lain. Jika konflik sosial pada skala domestik, TNI akan bertindak sesuai dengan kesepakatan dari Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, baik di tataran nasional maupun daerah.



Gambar 1. Persentase Luasan Konflik Per-Sektor

Sumber: Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, 2018, hlm. 30.

Selain konflik sosial, jenis konflik yang sedang menjadi perbincangan hangat pasca-debat kandidat Presiden yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 adalah konflik agraria. Konflik ini berkaitan erat dengan penggunaan lahan dan penentuan status lahan oleh pemerintah. Pada tahun 2018, data yang dirilis oleh KPA menunjukkan bahwa sebagian besar konflik agraria terjadi di sektor perkebunan.



Gambar 2. Jumlah Konflik Agraria di Setiap Sektor

Sumber: Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, 2018, hlm. 19.

Pada tahun 2018, ada 144 konflik agraria di sektor perkebunan. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan konflik agraria di sektor properti yang mencapai angka 137 kasus. Hanya saja luasan area didominasi oleh sektor perkebunan hingga mencapai 73% dari total keseluruhan lahan yang menjadi objek konflik agraria atau sejumlah 144 kasus.

Salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintahan Joko Widodo adalah distribusi tanah dengan pemberian sertifikat hak milik. Sayangnya, solusi ini justru menimbulkan permasalahan baru. Harga tanah meningkat, sehingga sebagian besar lahan dijadikan investasi tanpa ada pengelolaan untuk pengembangan. Dengan kata lain, lahan terbengkalai dan tidak produktif. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan

banyaknya distribusi lahan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan Joko Widodo, tetapi dampaknya terhadap pengurangan intensitas konflik agraria masih belum signifikan.

Tabel 1. Realisasi Distribusi Tanah Era Joko Widodo di Basis KPA

Nama Lokasi	Organisasi Tani	Luas (Ha)	Jumlah Penerima Objek Redistribusi Tanah (jiwa)
Desa Mangkit, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara	Serikat Petani Minahasa	444	491
Desa Pamegatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat	Serikat Petani Badega	220,46	557
Desa Pasawahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Serikat Petani Pasundan -Ciamis	30,9	100
Desa Tumbrek, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	Forum Perjuangan Petani Batang	89,841	425
Jumlah		785,201	1.573

Sumber: Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, 2018, hlm. 55.

Dalam penanganan konflik agraria, tidak ada partisipasi militer. Sistemnya sama dengan konflik sosial, jika konflik agraria sudah mengemuka menjadi ancaman di skala nasional, TNI mengambil peranan dalam penanganan konflik. Sayangnya, beberapa konflik agraria justru melibatkan TNI, khususnya untuk pembangunan wilayah militer. Jika ada keterlibatan TNI dalam konflik agraria di suatu wilayah yang bukan merupakan bagian dari pembangunan kawasan militer dan tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat, dapat dipastikan

bahwa tindakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan institusional, melainkan kepentingan pribadi oknum tertentu.

Keanekaragaman dan Ancaman Disintegrasi Bangsa di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mempunyai ribuan suku bangsa yang mengakui bahwa mereka terangkum dalam satu bangsa, yaitu Bangsa Indonesia. Pengakuan ini disampaikan dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 atau sekitar 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia ini yang mendorong terlahirnya suatu negara merdeka yang saat ini disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa Indonesia merupakan negara *primal nation-state*. Bangsa Indonesia yang menentukan kemerdekaannya dan membentuk negaranya sendiri dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Bangsa Indonesia mendirikan sebuah negara yang lengkap dengan tiga komponennya, yaitu idenya sebagai negara yang Bhinneka Tunggal Ika dan berpegang pada Pancasila, institusinya yang dibentuk dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan fisiknya yang kini disebut Nusantara. Ide pembentukan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur—sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945—tidak

pernah berubah. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, Indonesia tetap negara kesatuan dengan keanekaragaman di seluruh lapisan masyarakat.

Institusi negara Indonesia memang pernah mengalami beberapa perubahan sistem. Bahkan, pada tahun-tahun awal kemerdekaan, landasan konstitusional negara diganti karena situasi dan kondisi kala itu. Namun, dasar pelaksanaan tampuk pemerintahan tetaplah sama, yaitu Pancasila. Dasar negara Indonesia tetap kokoh dengan lima sila yang saling berkaitan.

Fisik negara Indonesia dapat dilihat dari wilayahnya yang didominasi oleh perairan dengan ribuan pulau kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Papua yang saat ini terus bergolak merupakan bagian dari Indonesia sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) menunjukkan bahwa masyarakat Papua lebih menginginkan bergabung dengan Indonesia. Wilayah Papua dengan seluruh masyarakat dan kekayaan alamnya merupakan bagian dari Indonesia.

Tidak hanya wilayah dengan kekayaan sumber daya alamnya, fisik Indonesia juga meliputi infrastruktur, sarana, dan prasarana yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Sarana komunikasi, transportasi, perairan, dan sebagainya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Indonesia. Bahkan, Satelit Palapa juga menjadi komponen fisik Indonesia. Komponen-komponen ini merupakan fondasi berdirinya

Indonesia yang harus dilindungi atas nama kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.

Jika ditinjau dari setiap komponen pembentukan negara, Indonesia mempunyai keanekaragaman yang tidak hanya terbatas pada karakteristik masyarakat, tetapi juga sumber daya alamnya dan karakter wilayahnya. Keanekaragaman ini yang menyatukan Indonesia, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada disintegrasi bangsa. Contoh sederhananya adalah konflik sosial antaragama yang terjadi pasca-pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Perbedaan agama mencuat diawali dengan mencuatnya perbedaan pilihan politik masyarakat. Selain itu, gerakan separatisme di Papua terus berupaya memisahkan diri dari Indonesia dengan propaganda bahwa masyarakat Papua tidak satu etnis dengan masyarakat lainnya di Indonesia. Upaya menonjolkan perbedaan etnis terus dilakukan oleh OPM, padahal di wilayah lainnya, masyarakat Papua hidup berdampingan dengan masyarakat setempat dan mendapatkan perlakuan yang tidak berbeda. Sejauh ini disintegrasi terjadi karena adanya upaya dari segelintir orang untuk menonjolkan perbedaan.

Konflik agraria berbeda dengan konflik sosial. Konflik agraria cenderung berkaitan dengan kepemilikan dan kepastian lahan serta hak pengelolaannya. Jika dalam konflik sosial, masyarakat bertarung dengan masyarakat, maka

konflik agraria seringkali terjadi antarmasyarakat, antara masyarakat dan perusahaan, atau masyarakat dan pemerintah. Konflik ini tidak berkaitan dengan ideologi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memicu konflik yang berujung pada tuntutan pemisahan diri. Sebagai contoh, permasalahan agraria yang mendorong terbitnya hak ulayat untuk masyarakat Papua digunakan pula oleh beberapa oknum untuk mendapatkan dukungan terhadap OPM.

Sesuatu dapat disebut sebagai ancaman terhadap keamanan nasional jika keberadaannya menyebabkan rusak atau hilangnya komponen pembentukan negara. Konflik agraria dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Hal ini didasari oleh empat alasan. *Pertama*, objek dan subjek sengketa merupakan bagian dari fisik negara, yaitu wilayah dan masyarakat Indonesia. Konflik agraria yang terus bereskalasi dapat menyebabkan kerusakan, baik terhadap wilayah maupun masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial.

Kedua, sebagian besar konflik agraria disebabkan oleh adanya dinamika kebijakan yang sangat cepat dan terkadang saling tumpang-tindih. Sebagai contoh, transmigran diberikan lahan di suatu kawasan yang ternyata berada di Kawasan Hutan Lindung, sehingga mereka tidak dapat mengelola lahan tersebut. Bahkan, sebagian masyarakat tidak mengurus Sertifikat Hak Milik karena prosesnya yang panjang dan

menguras keuangan mereka. Tumpang-tindihnya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk adanya kerusakan pada institusional negara. Kebijakan yang sejatinya diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan masyarakat dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, justru menimbulkan konflik.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah ruang lingkup pelaksanaan kebijakan. Dalam penanganan konflik agraria yang melibatkan perusahaan berbasis lahan, pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan sebelum pemerintah pusat, khususnya KLHK dan ATR/BPN mengeluarkan kebijakan tertentu. Selain itu, untuk mengharmonisasi seluruh kebijakan agraria membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu adanya koordinasi lintas K/L dan pembuatan kebijakan baru, seperti *Omnibus Law* yang digagas oleh Presiden Joko Widodo untuk era kedua dari pemerintahannya.

Ketiga, kemungkinan adanya unsur SARA yang digunakan sebagai dasar kepemilikan lahan. Pada beberapa kasus, konflik agraria terjadi dengan mengangkat isu SARA. Konflik ini dapat berkembang menjadi konflik agraria sekaligus konflik sosial. Sebagai contoh, pada konflik yang terjadi antara Suku Dayak dan Madura di Sampit. Sebagian orang akan menganggap hal tersebut sebagai konflik sosial, tetapi konflik ini juga dapat diklasifikasikan sebagai konflik agraria yang menyebabkan orang Madura terusir dari Kalimantan. Contoh lainnya, konflik

di Papua yang memanas sejak September 2019 menunjukkan ketidakpuasan masyarakat asli atau masyarakat adat terhadap kebijakan pemerintah dan adanya rasa terjajah dengan kehadiran pendatang, termasuk warga Indonesia yang berasal dari pulau lainnya.

Dengan kata lain, konflik agraria dapat terjadi ketika masyarakat suatu daerah mendatangi dan bermukim di daerah lain yang mempunyai perbedaan suku. Jika situasi terjadi demikian, maka jurang perbedaan antarmasyarakat semakin besar, sehingga menyebabkan tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Sebagai contoh, di Kabupaten Musi Banyuasin, transmigran cenderung lebih unggul. Hal ini menyebabkan adanya kecemburuan sosial antara masyarakat asli dan transmigran. Dengan kata lain, disintegrasi bangsa semakin mudah terjadi di Indonesia.

Keempat, konflik agraria yang tidak ditangani dengan tepat atau tidak terselesaikan biasanya disebabkan oleh *conflict attitude* dan *conflict behavior* yang tidak mendukung adanya resolusi konflik. *Conflict attitude* dan *conflict behavior* ini yang menentukan resolusi konflik agraria ke arah perundingan atau tidak. Konflik yang terjadi dalam kurun waktu panjang dan melibatkan lebih dari satu generasi menunjukkan polemik yang lebih tinggi. Generasi muda yang menggantikan orang tuanya cenderung lebih agresif dan bersikeras mempertahankan argumennya. Apalagi jika kaum muda

tersebut mempunyai latar pendidikan yang tidak mumpuni atau kurang memegang nilai-nilai Pancasila. Mereka cenderung menjauhi upaya-upaya resolusi konflik, sehingga dapat memperkeruh suasana. Hal ini meningkatkan peluang munculnya tindakan kekerasan yang dapat berdampak pada stabilitas negara.

Melihat pada alasan-alasan tersebut, konflik agraria merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Namun, manifestasi konflik agraria tidak selalu mengusung isu perbedaan atau keanekaragaman sebagai bangsa. Ada dimensi subjek-objek dan kebijakan untuk ditinjau sebelum mengklasifikasikan konflik agraria sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Kesimpulan

Untuk sebagian besar orang, konflik agraria merupakan permasalahan hukum perdata yang dapat diselesaikan dengan menggunakan jalur musyawarah, bagi-hasil, pengelolaan bersama, atau persidangan. Namun, banyak kepentingan yang hadir di balik sebuah konflik agraria. Keanekaragaman dapat menjadi sebuah alasan munculnya konflik agraria atau dapat dikatakan bahwa perbedaan merupakan salah satu potensi konflik agraria. Namun, ada dimensi subjek-objek dan kebijakan yang juga merupakan potensi konflik agraria. Potensi ini yang harus diredam melalui penanganan yang tepat untuk memperkecil potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia. Semakin kecil potensi konflik agraria, maka semakin kecil potensi

terjadinya disintegrasi, dan semakin kecil tingkat ancaman terhadap keamanan nasional, khususnya terhadap tiga komponen dasar negara.

Rekomendasi

Suatu bangunan yang kokoh dibangun dengan fondasi yang kuat begitu pula dengan suatu negara. Untuk menjadi negara yang kuat, Bangsa Indonesia memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seluruh masyarakat harus menyadari bahwa Bangsa Indonesia beranekaragam dan tidak dibatasi oleh sekat-sekat batas daerah dan nilai-nilai kedaerahan.

Untuk memperkuat moralitas bangsa, penanaman nilai-nilai Pancasila perlu didorong secara intensif sejak dini. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi jati diri Bangsa Indonesia perlu ditanamkan dalam semangat generasi muda dengan pendekatan yang tidak otoritatif. Tindakan otoritatif tidak akan membantu generasi muda memahami semangat Pancasila yang dimiliki oleh *founding fathers* Indonesia. Jiwa muda mereka tidak dapat dibatasi oleh peraturan, tetapi dapat dibimbing sesuai aturan.

Sebagaimana amanat landasan dasar dan konstitusional negara, pemerintah mengemban mandat dari rakyat untuk membentuk kebijakan yang dapat menertibkan dan membangun negara. Harmonisasi pelaksanaan kebijakan perlu ditingkatkan, khususnya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bahkan, untuk kepala daerah dapat

dilaksanakan pelatihan khusus terkait tata aturan yang sudah berlaku dan sedang dipersiapkan oleh lembaga legislatif.

Keberlangsungan negara ini tidak terletak di tangan satu atau dua orang. Bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila dan hasil pembangunan yang terbentang sepanjang Sabang-Merauke dan Miangas-Pulau Rote mempunyai peranan dalam menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanekaragaman adalah kekayaan pemersatu Indonesia. Konflik hanya riak kecil dalam kekeluargaan Bangsa Indonesia yang penyelesaiannya harus dilakukan bersama-sama.

Daftar Pustaka

Buku

Buzan, Barry. 1983. *People, States, and Fear 2nd Edition: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. Sussex: Wheatsheaf Book, Ltd.

Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2008. *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia.

Galtung, Johan. 1958. *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, and Formations*. Colombia: Colombia University.

Konsorsium Pembaruan Agraria. 2018. *Catatan Akhir Tahun 2018: Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

Jurnal

Cahyono, Heru. 2008. "The State and Society in Conflict Resolution in Indonesia (Conflict Area of West Kalimantan and Central Kalimantan)". *Journal of Indonesian Social Science and Humanities*. Vol. 1.

Website

CNBC Indonesia, 7 November 2019, "Wamen ATR Buka-bukaan Soal Tumpang Tindih Lahan dan Mafia Tanah", dala, <https://www.cnbcindonesia.com/profil/20191106155628-41-113177/wamen-atr-buka-bukaan-soal-tumpang-tindih-lahan-mafia-tanah>, diakses pada 8 November 2019.

Kantor Staf Kepresidenan, "KSP Siap Bantu DPRD Kabupaten se-Indonesia Selesaikan Konflik Agraria", 30 Agustus 2018, dalam <http://ksp.go.id/ksp-siap-bantu-dprd-kabupaten-se-indonesia-selesaikan-konflik-agraria/>, diakses pada 25 September 2019.

Lupito, A, "Konflik Pengelolaan Wisata Pantai di Kabupaten Malang dipastikan Berlanjut, Berikut Akar Persoalannya",

dalam <https://www.malangtimes.com/baca/32154/20181013/232400/konflik-pengelolaan-wisata-pantai-di-kabupaten-malang-dipastikan-berlanjut-berikut-akar-persoalannya>, diakses pada 8 November 2019.

Paszkiwicz, J. 2018. "Factors affecting disintegration and integration processes in the Balkans after the Cold War", dalam https://www.researchgate.net/publication/324390478_Factors_affecting_disintegration_and_integration_processes_in_the_Balkans_after_the_Cold_War.

Portal Informasi Indonesia. (n.d.), "Suku Bangsa", dalam <https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>, diakses 14 September 2019.

Surat Kabar

Azra, Azyumardi, "Pidana Kebencian", *Kompas*, 29 Agustus 2019.

Makalah

Vaccaro, Matthew. 2015. "Conflict Prevention and Resolution". *Defence Diplomacy Short Course* di Naval Postgraduate School, Monterey, pada 29 Juli 2015.

